



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan R.A Basoeni Nomor 35 Sooko Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61361
Telp. (0321) 322814 Fax. (0321) 328788 Website: <http://www.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/32223/ HK / 416 - 050 / 2023
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan **Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**) lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor **75, Tambahan** Lembaran Negara RI Nomor 3851), Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan **Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003** Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang **Tahapan, Tata Cara** Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi **Pelaksanaan Rencana Pembangunan** Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah **Nomor 18 Tahun 2016** tentang **Perangkat** Daerah
 5. Peraturan Daerah **Kabupaten** Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 **tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten** Mojokerto Tahun 2005 - 2025;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 — 2021 (Lembaran Daerah **Kabupaten** Mojokerto Tahun 2016a Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

MEMUUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Renja Sekretariat DPRD;
- KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN
- KEEMPAT : Uraian Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum Kedua, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, Desember 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO



Pembina Utama Muda
NIP. 196710201989031009



**P E M E R I N T A H
K A B U P A T E N M O J O K E R T O**



**RENCANA KERJA
(RENJA)**

TAHUN ANGGARAN 2024

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan penyusunannya secara rinci acuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya, kepada kita semua. Amin

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| BABI PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 8 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD | 10 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 16 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 24 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 25 |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 25 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 25 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 26 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 38 |
| Bab V PENUTUP | 42 |

BAB I

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
 2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
 3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang).
 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.
-

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
30. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/27/416-050/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rancangan Awal Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada APBD tahun 2024. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja prgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Sewkretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 91,88%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 94,80%
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 90,55%
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan:
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 87,88%
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,26%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 96,86%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0%
 - Penyediaan bahan/ material 87,78%

- Fasilitasi Kunjungan Tamu 93,93%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94,85%
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96,26%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98,25%
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96,27%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84,33%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 74,16%
- g) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 98,02%
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 92,62%
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 66,97%
- h) Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 95,59%

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pencapaian kinerja program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah terlaksananya Tri Fungsi Dewan (Legislasi, Budgeting dan Pengawasan) serta terfasilitasinya Hak DPRD sesuai peraturan yang berlaku.

Kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 84,03%
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 82,43%

- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik 96,29%
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran. Dengan sub kegiatan
- Pembahasan KUA dan PPAS 93,08%
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 74,70%
 - Pembahasan APBD 85,64%
 - Pembahasan APBD Perubahan 84,84%
 - Pembahasan Laporan Semester 95,34%
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 97,58%
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 99,00%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 91,52%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 95,28%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 94,87%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 92,47%
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 91,64%
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran 85,02%
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 98,05%
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
- Bimbingan Teknis DPRD 78,65%
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan 99,59%
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 94,92%
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 54,40%
 - Penyusunan Program Kerja DPRD 93,85%
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 96,94%
 - Pelaksanaan Reses 96,41%
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- Pengawasan Kode Etik DPRD 91,22%
- g) Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 96,84%
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 96,43%
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 85,98%
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 95,30%

Secara umum capaian realisasi anggaran dari 15 (limabelas) kegiatan dengan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan di atas mencapai 93,96%. Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

Tabel.1.1. (T C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023

| Kode | Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan | Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output) | Target kinerja capaian program (Rensra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|------------------------|---|--|--|
| | | | | | target Renja Perangkat Daerah 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah 2023 | Tingkat Realisasi 2023 | | Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (n-1) | Tingkat capaian realisasi target Renstra (n-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Nilai SAKIP | 81,38 | 78,68 | 79 | 80,25 | 105 % | 80,50 | 80,50% | 98,61 % |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun | | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 40% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|----|-------|-----|----|-------|------|
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 12 | 40% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase realisasi anggaran perangkat daerah | | | | | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan | 27 | 27 | 27 | 27 | 100 | 27 | 27 | 100% |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IP ASN | 85 | 80 | 81 | 90,25 | 111 | 92 | 90,25 | 120% |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 350 | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 140 | 40% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan | | | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 40% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|-----|
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40% |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% |
| | Penyediaan Bahan / Material | Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | | | | | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|----|----|----|-----|----|-----|------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 180 | 36 | 36 | 36 | 100 | 36 | 72 | 40% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 120 | 24 | 24 | 24 | 100 | 24 | 48 | 40% |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 290 | 58 | 58 | 58 | 100 | 58 | 116 | 40% |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100% |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | 15 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 40% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|----|----|------|----|----|--------|
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah orang orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD | 60 | 39 | 50 | 36 | 72% | 50 | 75 | 12,5 % |
| | Layanan Administrasi DPRD | Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat DPRD | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40% |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 10 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 40% |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 20 | 6 | 6 | 5 | 83% | 8 | 11 | 55% |
| | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau | 20 | 4 | 3 | 2 | 66% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|-----|---|---|-----|
| | atau Naskah Akademik | Naskah Akademik | | | | | | | | |
| | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas | | | | | | | | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi pelaksanaan APBD per Semester | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|---|---|-----|---|---|-----|
| | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 40% |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 40% |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 40% |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 40% |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 40% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|
| | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah dokumen hasil Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 40% |
| | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD | 30 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 12 | 100 |
| | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, Publikasi dan Dokumentasi dewan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 40% |
| | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 100 | 24 | 20 | 22 | 110 | 20 | 46 | 46% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|----|----|----|-----|----|----|---------|
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 150 | 30 | 30 | 24 | 80% | 30 | 44 | 29% |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah dokumen rencana Kerja DPRD | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang disusun | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Pelaksanaan Reses | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses | 14 | 3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6 | 42,85 % |
| | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | |
| | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 40% |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Tugas DPRD terfasilitasi | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 40% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---|---|---|-----|---|---|-----|
| | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah laporan Kinerja fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 40% |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terasilitasi | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 40% |
| | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terasilitasi | 20 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 8 | 40% |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel TC 30

Tabel 1.2.(T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

| No | Indikator | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|----|---|-----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| | | | Tahun 2020 (thn n-3) | Tahun 2021 (thn n-2) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (thn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | Tahun 2020 (thn n-3) | tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2024 (thn n+1) | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | |
| | Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Kesekretariatan DPRD | | | 70% | | | | | 70.16% | | | | | |
| | Persentase Perda yang disahkan | | | 85% | | | | | 100% | | | | | |
| | Persentase pemenuhan hak DPRD sesuai peraturan | | | 85% | | | | | 89% | | | | | |
| | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi. | | | | 75 | 75 | 80 | | | 60% | 83,33% | | 90% | |
| | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi | | | | 90 | 90 | 91 | | | 90% | 100% | | 100% | |
| | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi | | | | 80 | 81 | 85 | | | 80% | 100% | | 100% | |
| | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan | | | | 90 | 90 | 90 | | | 90% | 99,5% | | 95% | |

Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 bahwa di Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menetapkan besaran Indikator Kinerja Utama yaitu IKM DPRD sebesar 91,5.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja melalui metode survey dan wawancara kepada anggota DPRD di semester I dan Semester II, maka diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2023 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 93,58 atau mencapai 100,22% atau kategori BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto di Tahun 2023 mempunyai nilai kinerja sebesar 93,58.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD ditahun 2023 yaitu sebesar 91,5 telah terpenuhi dan bahkan memperoleh capaian kinerja melebihi target sebesar 0,22 atau presentase capaian melebihi target sebesar 0,22%.

Untuk lebih detailnya dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Nilai rata-rata FASILITAS UMUM 53 dengan interpretasi Fasilitas Umum perlu ditingkatkan.
- b. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG RAPAT 63,00 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- c. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG KERJA/ FRAKSI sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- d. Nilai rata-rata FASILITAS MAKANAN DAN MINUMAN sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- e. Nilai rata-rata FASILITAS ANGGARAN sebesar 56,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- f. Nilai rata-rata FASILITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) sebesar 54,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- g. Nilai rata-rata FASILITAS PERSONAL sebesar 52,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- h. Nilai rata-rata FASILITAS KEGIATAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- i. Nilai rata-rata FASILITAS INFORMASI sebesar 49,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 4 (Empat) bagian di Sekretariat DPRD dapat diketahui bahwa 4 (empat) bagian tersebut telah melampaui capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-bagian tersebut lebih dapat meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD.

Dan apabila ke 9 (sembilan) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke dalam angka IKM, maka diperoleh angka 93,58.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto maka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sebagai Badan Legislatif Daerah yang mencerminkan makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, maka dalam upaya untuk mendukung tugas organisasi tersebut Sekretariat DPRD merumuskan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan sebagai landasan atau dasar dalam acuan kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi DPRD;
- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel TC 31 Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (riil) dalam RenjaSKPD.

Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD Kabupaten Mojokerto dengan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto telah sesuai.

Tabel 2.1 (TC.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|-----------|---|-------------------|-------------------|---|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | | | | | (Rp.) | | | | | (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | MOJOKERTO | Nilai SAKIP | 81 (A) | 42.745.435.074 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | MOJOKERTO | Nilai SAKIP | 81 (A) | 47.535.000.000 | |
| | | | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 1 | | | | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 1 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MOJOKERTO | Persentase indikator program PD yang tercapai sesuai target | 90 % | 10.000.000 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MOJOKERTO | Persentase indikator program PD yang tercapai sesuai target | 90 % | 30.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|----------------|----------------------|--|------------------|--|----------------|----------------------|--|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 5.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 15.000.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 laporan | 5.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 laporan | 15.000.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Presentase realisasi anggaran perangkat daerah | 84% | 3.400.000.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | MOJOKERTO | Presentase realisasi anggaran perangkat daerah | 84% | 3.400.000.000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | MOJOKERTO | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 orang/bulan | 3.400.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | MOJOKERTO | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 orang/bulan | 3.400.000.000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | IP ASN | 90,6% | 350.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | MOJOKERTO | IP ASN | 90,6% | 650.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 70 orang | 350.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | MOJOKERTO | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 70 orang | 600.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------|--------------------|--|------------------|--|-------------|----------------------|--|
| | | | Undangan | | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | MOJOKERTO | Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan | 100% | 835.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | MOJOKERTO | Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan | 100% | 3.865.000.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | MOJOKERTO | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 250.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | MOJOKERTO | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 2.500.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | MOJOKERTO | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 35.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | MOJOKERTO | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 50.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 100.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | MOJOKERTO | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 250.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|-------------|----------------------|---|------------------|---|-------------|----------------------|--|
| | Penyediaan bahan/Material | MOJOKERTO | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 paket | 100.000.000 | Penyediaan Bahan / Material | MOJOKERTO | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 paket | 200.000.000 | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 laporan | 150.000.000 | Fasilitas Kunjungan Tamu | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 laporan | 300.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 200.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 550.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | 83 % | 2.280.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MOJOKERTO | Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | 83 % | 2.600.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 600.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 700.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 12 laporan | 1.680.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1.900.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|------------|-----------------------|--|------------------|--|------------|-----------------------|--|
| | | | Kantor yang Disediakan | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MOJOKERTO | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik | 83% | 800.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | MOJOKERTO | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik | 83% | 2.650.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya | 27 unit | 550.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya | 27 unit | 650.000.000 | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | MOJOKERTO | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik | 1 unit | 100.000.000 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | MOJOKERTO | Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara | 1 unit | 1.500.000.000 | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 48 unit | 150.000.000 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | MOJOKERTO | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 48 unit | 500.000.000 | |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan | MOJOKERTO | Persentase Layanan Keuangan dan | 91% | 34.357.804.074 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | MOJOKERTO | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 91% | 33.590.000.000 | |

| | n DPRD | | Kesejahteraan DPRD terfasilitasi | | | | | terfasilitasi | | | |
|--|--|-----------|--|--------------|----------------|--|-----------|--|--------------|----------------|--|
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 50 orang/bln | 33.472.804.474 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 50 orang/bln | 33.000.000.000 | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 150 paket | 800.000.000 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 150 paket | 500.000.000 | |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 50 orang | 85.000.000 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 50 orang | 90.000.000 | |
| | Layanan Administrasi DPRD | MOJOKERTO | Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi | 100% | 750.000.000 | Layanan Administrasi DPRD | MOJOKERTO | Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi | 100% | 750.000.000 | |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 laporan | 700.000.000 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 laporan | 750.000.000 | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | MOJOKERTO | Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 10 dokumen | 54.754.564.926 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | MOJOKERTO | 10 dokumen | 10 dokumen | 39.502.380.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-----------|----------------------|--|------------------|--|-----------|----------------------|--|
| | | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi | 70% | 8.892.043.126 | | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi | 70% | 47.370.000.000 | |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | MOJOKERTO | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi | 80% | 8.892.043.126 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | MOJOKERTO | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi | 80% | 7.900.000.000 | |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 2 dokumen | 1.200.000.000 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 2 dokumen | 600.000.000 | |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 8 dokumen | 3.392.043.126 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 8 dokumen | 4.500.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|------------|----------------------|--|------------------|---|------------|----------------------|--|
| | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 dokumen | 3.800.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 dokumen | 2.500.000.000 | |
| | Penyusunan tata tertib DPRD | MOJOKERTO | Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun | 1 dokumen | 500.000.000 | Penyusunan tata tertib DPRD | MOJOKERTO | Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun | 1 dokumen | 300.000.000 | |
| | | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi | 90% | 8.110.000.000 | | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi | 90% | 8.500.000.000 | |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | MOJOKERTO | Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas | 90% | 8.110.000.000 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | MOJOKERTO | Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas | 90% | 8.500.000.000 | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 dokumen | 1.600.000.000 | Pembahasan KUA dan PPAS | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 dokumen | 1.200.000.000 | |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan | 1 dokumen | 1.600.000.000 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 dokumen | 1.200.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--|-----------|----------------------|--|
| | PPAS | | PPAS | | | | | | | | |
| | Pembahasan APBD | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 dokumen | 10.000.000 | Pembahasan APBD | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 dokumen | 3.200.000.000 | |
| | Pembahasan APBD Perubahan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 dokumen | 1.600.000.000 | Pembahasan APBD Perubahan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 dokumen | 1.200.000.000 | |
| | Pembahasan Laporan Semester | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 dokumen | 900.000.000 | Pembahasan Laporan Semester | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 dokumen | 500.000.000 | |
| | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 dokumen | 2.400.000.000 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 dokumen | 1.200.000.000 | |
| | | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi | 85% | 16.400.000.000 | | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi | 85% | 1.900.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|-----------|-----------------------|--|------------------|---|-----------|----------------------|--|
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | MOJOKERTO | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi | 85% | 16.400.000.000 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | MOJOKERTO | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi | 85% | 1.900.000.000 | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 4 laporan | 3.000.000.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum | 4 laporan | 1.800.000.000 | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 2 laporan | 1.700.000.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 2 laporan | 900.000.000 | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 4 laporan | 3.000.000.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 4 laporan | 1.800.000.000 | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 4 laporan | 3.200.000.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 4 laporan | 1.800.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-----------------------|----------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------|--|
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 2 laporan | 1.700.000.000 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 2 laporan | 900.000.000 | |
| | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 laporan | 1.000.000.000 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 laporan | 600.000.000 | |
| | Pengawasan Penggunaan Anggaran | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 2 dokumen | 1.200.000.000 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 2 dokumen | 600.000.000 | |
| | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | MOJOKERTO | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 dokumen rekomendasi | 1.600,000.000 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | MOJOKERTO | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 dokumen rekomendasi | 1.500,000.000 | |
| | | | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan | 90% | 21.352.521.800 | | | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan | 90% | 5.350.000.000 | |

| | Peningkatan Kapasitas DPRD | MOJOKERTO | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi | 90% | 5.643.106.800 | Peningkatan Kapasitas DPRD | MOJOKERTO | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi | 90% | 5.350.000.000 | |
|--|--|------------------|--|------------|----------------------|--|------------------|--|------------|----------------------|--|
| | Orientasi DPRD | MOJOKERTO | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD | 1 dokumen | 532.391.000 | Orientasi DPRD | MOJOKERTO | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD | 1 dokumen | 500.000.000 | |
| | Pendalaman Tugas DPRD | MOJOKERTO | Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD | 6 dokumen | 3.260.715.800 | Pendalaman Tugas DPRD | MOJOKERTO | Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD | 6 dokumen | 3.200.000.000 | |
| | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 12 dokumen | 750.000.000 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 12 dokumen | 700.000.000 | |
| | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | MOJOKERTO | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 10 Orang | 175.000.000 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | MOJOKERTO | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 10 Orang | 150.000.000 | |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | MOJOKERTO | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 70 orang | 75.000.000 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | MOJOKERTO | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 70 orang | 200.000.000 | |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 dokumen | 850.000.000 | Penyusunan Program Kerja DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 dokumen | 600.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-------------|-----------------------|--|------------------|--|-------------|-----------------------|--|
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | MOJOKERTO | Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi | 100% | 870.000.000 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | MOJOKERTO | Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi | 100% | 2.820.000.000 | |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 dokumen | 70.000.000 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 dokumen | 120.000.000 | |
| | Pelaksanaan Reses | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 dokumen | 800.000.000 | Pelaksanaan Reses | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 dokumen | 2.700.000.000 | |
| | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | MOJOKERTO | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi | 81% | 850.000.000 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | MOJOKERTO | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi | 81% | 500.000.000 | |
| | Penyusunan kode Etik DPRD | MOJOKERTO | Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD | 1 dokumen | 350.000.000 | Penyusunan kode Etik DPRD | MOJOKERTO | Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD | 1 dokumen | 200.000.000 | |
| | Pengawasan Kode Etik DPRD | MOJOKERTO | Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD | 4 laporan | 500.000.000 | Pengawasan Kode Etik DPRD | MOJOKERTO | Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD | 4 laporan | 300.000.000 | |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | MOJOKERTO | Persentase Tugas DPRD terfasilitasi | 81% | 13.989.415.000 | Fasilitasi Tugas DPRD | MOJOKERTO | Persentase Tugas DPRD terfasilitasi | 81% | 12.400.000.000 | |
| | Koordinasi dan Konsultasi | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi | 4 dokumen | 6.237.663.000 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi | 4 dokumen | 7.000.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|-----------|---------------|---|-----------|---|-----------|---------------|--|
| | Pelaksanaan Tugas DPRD | | dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | Tugas DPRD | | Pelaksanaan Tugas DPRD | | | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Kinerja Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 laporan | 850.000.000 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Laporan Kinerja Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 laporan | 900.000.000 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 2 dokumen | 1.200.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 2 dokumen | 1.000.000.000 | |
| | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 4 dokumen | 5.701.752.000 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | MOJOKERTO | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 4 dokumen | 3.500.000.000 | |

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2. (TC 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Kepentingan tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

| NOMOR | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN VOLUME | CATAN |
|-------|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Perpres Nomor 27 tahun 2015 tentang sekretariat Jendral DPRD RI dan badan Keahlian DPR RI. Sekretariat jendral DPR RI adalah unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan yang tugasnya memberikan bantuan teknis, Administratif dan bantuan keahlian.

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala daerah dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perubahan RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tetap menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”**.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat DPRD tidak mengubah sasaran Perangkat Daerah dan tetap menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD”.

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujua/Sasaran | Capaian 2023 | Target 2024 |
|-----|--|--|--|--------------|-------------|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Sekretariat DPRD | 92,56 | 93 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat DPRD | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Sekretariat DPRD | 92,56 | 93 |

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

b. Adapun program-program di tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut
Program Utama :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;

Dari program tahun 2024 tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda
 - 1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - 1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Tata tertib DPRD
- 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
 - 1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 1.2.3 Pembahasan APBD
 - 1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
 - 1.2.5 Pembahasan Laporan Semester
 - 1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 1.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1.3.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 1.3.2 Pelaksanaan Reses
- 1.4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 1.4.1 Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 1.4.2 Pengawasan Kode Etik DPRD
- 1.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1.5.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 1.5.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 1.5.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 1.5.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - 1.5.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

- 1.5.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 1.5.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 1.5.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 1.6 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1.6.1 Orientasi DPRD
 - 1.6.2 Pendalaman Tugas DPRD
 - 1.6.3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 1.6.4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 1.6.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 1.6.6 Penyusunan Program Kerja DPRD
- 1.7 Fasilitasi Tugas DPRD
 - 1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
 - 1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 1.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 1.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - 2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 2.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 2.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan Penyediaan Bahan/Material
 - 2.4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 2.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.4.6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.4.7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2.5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.6 Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD
- 2.6.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 2.6.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 2.6.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 2.7 Layanan Administrasi DPRD
- 2.7.1 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana perubahan RPJMD dan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
tertuang dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025

OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | Nilai SAKIP | Setwan | 81 (BB) | 42.745.435.074 | APBD | | 81,5 (A) | |
| | | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | Setwan | 1 | | | | 1 | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target | Setwan | 90% | 10.000.000 | APBD | | 91% | 44.000.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Setwan | 2 dokumen | 5.000.000 | APBD | | 2 dokumen | 22.000.000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Setwan | 6 laporan | 5.000.000 | APBD | | 4 dokumen | 22.000.000 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase realisasi anggaran perangkat daerah | Setwan | 85% | 3.400.000.000 | APBD | | 86% | 6.000.000.000 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Setwan | 27/ bulan | 3.400.000.000 | APBD | | 14 bulan | 6.000.000.000 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IP ASN | Setwan | 83 | 350.000.000 | APBD | | 84% | 860.000.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Setwan | 27 Stel/1 paket | | APBD | | 30 stel | 60.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|-------------|----------------------|-------------|--|-------------|----------------------|
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Setwan | 70 orang | 350.000.000 | APBD | | 7 kegiatan | 800.000.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan | Setwan | 100% | 835.000.000 | APBD | | 100% | 4.230.000.000 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Setwan | 3 paket | 250.000.000 | APBD | | 3 paket | 2.660.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Setwan | 12 paket | 35.000.000 | APBD | | 1 paket | 55.000.000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Setwan | 1 paket | 100.000.000 | APBD | | 1 paket | 250.000.000 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Setwan | 1 dokumen | 00 | APBD | | 1 paket | 15.000.000 |
| | Penyediaan Bahan / Material | Jumlah paket Bahan/Material yang Disediakan | Setwan | 12 paket | 100.000.000 | APBD | | 1 paket | 250.000.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Setwan | 12 laporan | 150.000.000 | APBD | | 12 bulan | 300.000.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Setwan | 12 laporan | 200.000.000 | APBD | | 12 bulan | 700.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | Setwan | 84 % | 2.280.000.000 | APBD | | 84 % | 3.350.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|----------------|-----------------------|-------------|--|----------------|-----------------------|
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan | Setwan | 12 laporan | 600.000.000 | APBD | | 12 bulan | 850.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Setwan | 12 laporan | 1.680.000.000 | APBD | | 12 bulan | 2.500.000.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik | Setwan | 84 % | 800.000.000 | APBD | | 85 % | 2.700.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan d bayarkan pajak dan perijinannya | Setwan | 27 unit | 550.000.000 | APBD | | 27 unit | 700.000.000 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Setwan | 1 unit | 100.000.000 | APBD | | 1 unit | 1.500.000.000 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Setwan | 58 unit | 150.000.000 | APBD | | 58 unit | 500.000.000 |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi | Setwan | 92% | 34.357.804.074 | APBD | | 93% | 40.150.000.000 |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD | Setwan | 50 orang/bulan | 33.472.804.474 | APBD | | 50 orang/bulan | 40.000.000.000 |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | Setwan | 3 paket/org | 800.000.000 | APBD | | 3 paket/org | 550.000.000 |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah orang orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD | Setwan | 30 orang | 85.000.000 | APBD | | 30 orang | 95.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--------------|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------------------|
| | Layanan Administrasi DPRD | Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi | Setwan | 100% | 750.000.000 | APBD | | 100% | 850.000.000 |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat DPRD | Setwan | 12 laporan | 700.000.000 | APBD | | 12 laporan | 850.000.000 |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | | 87,5% | 54.754.564.926 | | | 87,5% | 84.070.000.000 |
| | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi | | 80% | 8.892.043.126 | | | 80% | 12.000.000.000 |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi | Setwan | 80% | 8.892.043.126 | APBD | | 80% | 12.000.000.000 |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Setwan | 2 dokumen | 1.200.000.000 | APBD | | 2 dokumen | 2.000.000.000 |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Setwan | 8 dokumen | 3.392.043.126 | APBD | | 4 dokumen | 5.000.000.000 |
| | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | Setwan | 4 dokumen | 3.800.000.000 | APBD | | 4 dokumen | 5.000.000.000 |
| | Penyusunan tata tertib DPRD | Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun | Setwan | 1 dokumen | 500.000.000 | - | - | - | - |
| | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi | | 90% | 8.110.000.000 | | | 90% | 18.000.000.000 |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas | Setwan | 90% | 8.110.000.000 | APBD | | 90% | 18.000.000.000 |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS | Setwan | 1 dokumen | 1.600.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 2.500.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------------|
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen hasil Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Setwan | 1 dokumen | 1.600.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 2.500.000.000 |
| | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD | Setwan | 1 dokumen | 10.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 5.500.000.000 |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan | Setwan | 1 dokumen | 1.600.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 2.500.000.000 |
| | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi pelaksanaan APBD per Semester | Setwan | 1 dokumen | 900.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 1.500.000.000 |
| | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Setwan | 1 dokumen | 2.400.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 3.500.000.000 |
| | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi | | 90% | 16.400.000.000 | | | 90% | 27.000.000.000 |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi | Setwan | 90% | 16.400.000.000 | APBD | | 90% | 27.000.000.000 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum | Setwan | 4 laporan | 3.000.000.000 | APBD | | 24 kegiatan | 5.000.000.000 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur | Setwan | 2 laporan | 1.700.000.000 | APBD | | 12 kegiatan | 3.000.000.000 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Setwan | 4 laporan | 3.000.000.000 | APBD | | 24 kegiatan | 5.000.000.000 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Setwan | 4 laporan | 3.200.000.000 | APBD | | 24 kegiatan | 5.000.000.000 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Setwan | 2 laporan | 1.700.000.000 | APBD | | 12 kegiatan | 3.000.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|------------|-----------------------|-------------|---|-------------|----------------------|
| | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah dokumen hasil Pengawasantindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK | Setwan | 1 dokumen | 1.000.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 1.500.000.000 |
| | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Setwan | 2dokumen | 1.200.000.000 | APBD | | 12 kegiatan | 2.000.000.000 |
| | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Setwan | 1 dokumen | 1.600,000.000 | APBD | | 1 dokumen | 2.500.000.000 |
| | | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan | | 90% | 21.352.521.800 | | | 90% | 27.070.000 |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi | Setwan | 90% | 5.643.106.800 | APBD | | 90% | 6.200.000.000 |
| | Orientasi DPRD | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD | Setwan | 1 dokumen | 532.391.000 | - | - | - | - |
| | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD | Setwan | 6 dokumen | 3.260.715.800 | APBD | | 6 dokumen | 4.500.000.0000 |
| | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, Publikasi dan Dokumentasi dewan | Setwan | 12 dokumen | 750.000.000 | APBD | | 12 dokumen | 900.000.000 |
| | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Setwan | 10 Orang | 175.000.000 | APBD | | 10 Orang | 200.000.000 |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Setwan | 70 orang | 75.000.000 | APBD | | 70 orang | 100.000.000 |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah dokumen rencana Kerja DPRD | Setwan | 1 dokumen | 850.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 1.400.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|-------------|-----------------------|-------------|---|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi | | 100% | 870.000.000 | APBD | | 100% | 3.070.000.000 |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang disusun | Setwan | 1 dokumen | 70.000.000 | APBD | | 1 dokumen | 70.000.000 |
| | Pelaksanaan Reses | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses | Setwan | 3 dokumen | 800.000.000 | APBD | | 3 dokumen | 3.000.000.000 |
| | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | 81% | 850.000.000 | APBD | | 81% | 800.000.000 |
| | Penyusunan kode Etik DPRD | Jumlah dokumen kode etik dan tata beracara DPRD | Setwan | 1 dokumen | 350.000.000 | - | - | - | - |
| | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah laporan hasil pengawasan Kode Etik DPRD | Setwan | 4 laporan | 500.000.000 | APBD | | 4 laporan | 800.000.000 |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Tugas DPRD terfasilitasi | Setwan | 81% | 13.989.415.000 | APBD | | 81% | 17.000.000.000 |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Setwan | 4 Dokumen | 6.237.663.000 | APBD | | 4 Dokumen | 8.500.000.000 |
| | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah laporan Kinerja fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun | Setwan | 1 laporan | 850.000.000 | APBD | | 1 laporan | 1.500.000.000 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi | Setwan | 2 Dokumen | 1.200.000.000 | APBD | | 2 Dokumen | 2.000.000.000 |
| | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi | Setwan | 4 Dokumen | 5.701.752.000 | APBD | | 4 Dokumen | 5.000.000.000 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kab. Mojokerto yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia”**, ditempuh melalui lima misi dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melaksanakan misike 3 (tiga) yaitu **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”** dengan tujuan RPJMD. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan melalui program – program Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak mempunyai penelaahan usulan program dan kegiatan yang mendukung Program Tahun 2025 dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD adalah OPD penunjang yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan uraian kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan pada Tabel Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 4.1
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024

| No | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | UP | B/L | INDIKATOR KINERJA | | | | LOKASI | APBD KAB (Rp) | APBD PROV | | APBN | | |
|----|------|--|----|-----|--|---|---|----------------|---------|-----------------------|--------------|-----------|------|----|----------|
| | | | | | OUTPUT SUB KEGIATAN | OUTPUT KEGIATAN | OUTCOME PROGRAM | TARGET | | | SKPD Terkait | PAGU (Rp) | K/L | Rp | D/TB/DAK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA | | | | | Nilai SAKIP | 81 (BB) | SET WAN | 42.745.435.074 | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 1 | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target | | 90% | | 10.000.000 | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 2 dokumen | SET WAN | 5.000.000 | | | | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 6 laporan | SET WAN | 5.000.000 | | | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Presentase realisasi anggaran | | 85% | SET WAN | 3.400.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | perangkat daerah | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | | Jumlah orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan | | 27/ bulan | SET WAN | 3.400.000.000 | | | | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | IP ASN | 83 | SET WAN | 350.000.000 | | | | | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | | 27 Stel/1 paket | SET WAN | | | | | | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | | 70 orang | SET WAN | 350.000.000 | | | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan | 100% | SET WAN | 835.000.000 | | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 3 paket | SET WAN | 250.000.000 | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan | | 12 paket | SET WAN | 35.000.000 | | | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | | 1 paket | SET WAN | 100.000.000 | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Dokumen bahan Bacaan | | 1 dokumen | SET WAN | 00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|-------------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan / Material | | Jumlah paket bahan/ material (ATK) yang di sediakan | | | 12 paket | | 100.000.000 | | | | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu | | | 12 laporan | SET WAN | 150.000.000 | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 12 laporan | SET WAN | 200.000.000 | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Presentase penyediaan jaasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | | 84 % | SET WAN | 2.280.000.000 | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik | | | 12 laporan | SET WAN | 600.000.000 | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | | | 12 laporan | SET WAN | 1.680.000.000 | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik | | 84 % | SET WAN | 800.000.000 | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan Kendaraan dinas operasional dan lapangan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 27 unit | SET WAN | 550.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------------------|----------------|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | dan dipelihara di bayarkan pajaknya | | | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | | | 1 unit | SET WAN | 100.000.000 | | | | | |
| | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | | | 58 unit | SET WAN | 150.000.000 | | | | | |
| | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 91% | 92% | SET WAN | 34.357.804.074 | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak Keuangan DPRD | | | 50 orang/bulan | SET WAN | 33.472.804.474 | | | | | |
| | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | | | 150 paket | SET WAN | 800.000.000 | | | | | |
| | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD | | | 50 orang | SET WAN | 85.000.000 | | | | | |
| | | Layanan Administrasi DPRD | | | Persentase layanan Administrasi DPRD | 100% | 100% | SET WAN | 750.000.000 | | | | | |
| | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | Jumlah laporan hasil Fasilitasi koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | 12 laporan | SET WAN | 700.000.000 | | | | | |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | | | Persentase Dukungan | 70% | SET WAN | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|------------|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi | | | 54.754.564.926 | | | | | |
| | | | | | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi | 80% | SET WAN | 8.892.043.126 | | | | | |
| | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan daerah dan peraturan DPRD terfasilitasi | 85% | SET WAN | 8.892.043.126 | | | | | |
| | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah | | 2 dokumen | SET WAN | 1.200.000.000 | | | | | |
| | | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | Jumlah dokumen hasil Raperda | | 8ndokumen | SET WAN | 3.392.043.126 | | | | | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik | | | Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | | 4 dokumen | SET WAN | 3.800.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|-----------|---------|---------------|--|--|--|--|--|
| | Penyusunan Tata tertib DPRD | | Jumlah Dokumen tata tertib tersusun | | | 1 dokumen | | 500.000.000 | | | | | |
| | | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi | | | 90% | SET WAN | 8.110.000.000 | | | | | |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | Persentase dokumen kebijakan Anggaran dibahas | | 90% | SET WAN | 8.110.000.000 | | | | | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | | Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS | | | 1 dokumen | SET WAN | 1.600.000.000 | | | | | |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan perubahan PPAS | | | 1 dokumen | SET WAN | 1.600.000.000 | | | | | |
| | Pembahasan APBD | | Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD | | | 1 dokumen | SET WAN | 10.000.000 | | | | | |
| | Pembahasan APBD Perubahan | | Jumlah Dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan | | | 1 dokumen | SET WAN | 1.600.000.000 | | | | | |
| | Pembahasan Laporan Semester | | Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester | | | 1 dokumen | SET WAN | 900.000.000 | | | | | |
| | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | Jumlah dokumen hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | 1 dokumen | SET WAN | 2.400.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------------|---------|----------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi | 85% | SET WAN | 16.400.000.000 | | | | | |
| | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi | 85% | SET WAN | 16.400.000.000 | | | | | |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | | Jumlah laporan hasil pengawasan Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan dan Hukum | | 4 Laporan | SET WAN | 3.000.000.000 | | | | | |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur | | 2 laporan | SET WAN | 1.700.000.000 | | | | | |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat | | 4 laporan | SET WAN | 3.000.000.000 | | | | | |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian | | 4 laporan | SET WAN | 3.200.000.000 | | | | | |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan | | 2 laporan | SET WAN | 1.700.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|------------|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | bidang Sumber daya alam | | | | | | | | | | |
| | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK | | | 1 dokumen | SET WAN | 1.000.000.000 | | | | | |
| | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | Jumlah Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran | | | 1 dokumen | SET WAN | 1.200.000.000 | | | | | |
| | | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah | | | 1 dokumen | SET WAN | 1.600,000.000 | | | | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan | 90% | SET WAN | 21.352.521.800 | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | Persentase peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi | | 90% | SET WAN | 5.643.106.800 | | | | | |
| | | Orientasi DPRD | | Jumlah Dokumen Laporan Hasil Orientasi DPRD | | | 1 dokumen | | 532.391.000 | | | | | |
| | | Pendalaman Tugas DPRD | | Jumlah Dokumen Laporan hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | 6 dokumen | SET WAN | 3.260.715.800 | | | | | |
| | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | | Jumlah Dokumen penyebar luasan produk | | | 12 dokumen | SET WAN | 750.000.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|------------------|---------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | hukum daerah, publikasi dan Dokumentasi dewan | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | | | 10 orang | SET WAN | 175.000.000 | | | | | | |
| | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | Jumlah tenaga ahli Fraksi | | | 70 orang | SET WAN | 75.000.000 | | | | | | |
| | | Penyusunan Program Kerja DPRD | | Jumlah dokumen rencana kerja DPRD | | | 1 dokumen | SET WAN | 850.000.000 | | | | | | |
| | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | Persentase kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terfasilitasi | | 100% | SET WAN | 870.000.000 | | | | | | |
| | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun | | | 1 dokumen | SET WAN | 70.000.000 | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Reses | | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses | | | 3 dokumen | SET WAN | 800.000.000 | | | | | | |
| | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD terfasilitasi | | 81% | SET WAN | 850.000.000 | | | | | | |
| | | Penyusunan Kode Etik | | Jumlah dokumen Kode Etik tersusun | | | 1 dokumen | | 350.000.000 | | | | | | |
| | | Pengawasan Kode Etik DPRD | | Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD | | | 4 laporan | SET WAN | 500.000.000 | | | | | | |

| Fasilitasi Tugas DPRD | | | | Persentase tugas DPRD terfasilitasi | 81 % | SET WAN | 13.989.415.000 | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------|-----------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | 4 Dokumen | SET WAN | 6.237.663.000 | | | | | |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah laporan kinerja fraksi, alat kllngkapan dan kinerja DPRD yang disusun | | | 1 dokumen | SET WAN | 850.000.000 | | | | | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus | | | 4 Dokumen | SET WAN | 1.200.000.000 | | | | | |
| | | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | 4 dokumen | SET WAN | 5.701.752.000 | | | | | |
| | | | | | | | | 97.500.000.000 | | | | | |

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan sebagai bahan penyusunan Perubahan KUPA-PPAS/R-APBDP Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto pada tahun 2024 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Sekretariat DPRD tahun 2024, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKAP/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja dengan memperhatikan evaluasi tahun anggaran 2023, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian berdasar hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2023, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam perubahan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO**



Dr. BAMBANG WAHYUADI, MH
Pembina Utama Muda
NIP.196710201989031009